

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR  
1238/PID.SUS/2018/PN.MKS TENTANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU**

**SKRIPSI**

Oleh:

Arlissa Ramadhani

NIM. C93215046



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arlissa Ramadhani

NIM : C93215046

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana  
Kekerasan Dalam Penyeleggaraan Pemilu Putusan  
Nomor.1238/Pid.Sus/2018/PN.Mks

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 September 2019

Saya menyatakan



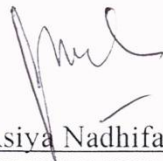
Arlissa Ramadhani  
NIM.C93215046

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Arlissa Ramadhani NIM. C9321504 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan .

Surabaya, 23 Juli 2019

Pembimbing



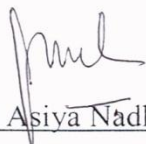
Nurul Asiya Nadhifah, M.HI  
NIP. 197504232003122001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Arlissa Ramadhani NIM. C93215046 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Rabu tanggal 04 September 2019 dan dapat diterima selah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



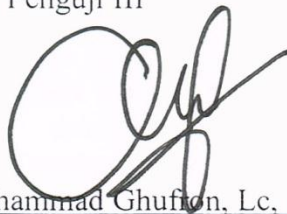
Nurul Asiya Nadhifa, M.Hi.  
NIP. 197504232003122001

Penguji II



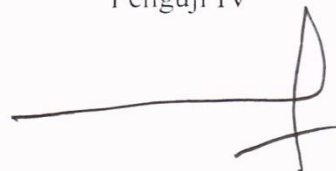
Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.  
NIP. 195704231986032001

Penguji III



H. Muhammad Ghufhon, Lc, M.Hi.  
NIP. 197602242001121003

Penguji IV



Agus Solikin, S.Pd, M.Si.  
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 10 September 2019

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,



H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arlissa Ramadhani  
NIM : C93215046  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail address : [Arlissaramadhani2098@gmail.com](mailto:Arlissaramadhani2098@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
MAKASSAR NOMOR 1238/PID.SUS/2018/PN.MKS TENTANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Oktober 2019

Penulis

  
(Arlissa Ramadhani)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana kekerasan dalam Penyelenggaraan Pemilu (Kajian Putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor.1238/Pid.sus/2018/PN.Mks). Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor.1238/Pid.Sus/2018/PN.Mks tentang tindak pidana kekerasan dalam penyelenggaraan pemilu dan bagaimana analisis hukum islam terhadap hukuman dalam putusan nomor.1238/Pid.Sus/2018/PN.Mks tentang tindak pidana kekerasan dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Makassar sebagai data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-undang, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisa dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana islam.

Dari hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pengadilan Negeri Makassar dalam memutus sanksi bagi pelaku penganiyaan terhadap anggota pengawas pemilu kecamatan yang sudah sesuai dengan ketentuan hukuman ta'zir menurut hukum pidana islam, hukuman *ta'zir* diserahkan kepada hakim. Hakim telah menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 3 bulan karena terdakwa sudah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan pasal 198A.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang kekuasaan disarankan tindakan hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya memperhatikan yang semestinya bahwa asas hukum pidana harus menjadi dasar perimbangan hakim . Hal ini harus dilakukan agar hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya mengedepankan efek jera tetapi juga membuat unsur edukatif bagi pelaku tindak pidana tersebut.

## DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM.....	i	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii	iii
PENGESAHAN.....	iv	iv
ABSTRAK.....	v	v
KATA PENGANTAR.....	vi	vi
DAFTAR ISI.....	viii	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi	xi
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah.....	1
B.	Identifikasi Masalah.....	8
C.	Batasan Masalah.....	8
D.	Rumusan Masalah.....	8
E.	Kajian Pustaka.....	9
F.	Tujuan Penelitian.....	9
G.	Kegunaan Hasil Penelitian .....	9
H.	Definisi Operasional .....	10
I.	Metode Penelitian.....	11
J.	Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II	JARĪMAH TA'ZĪR	
A.	Tindak Pidana dalam Hukum Islam .....	17





## PENDAHULUAN

Yang pertama adalah makna dari sistem pemilihan umum (pemilu), terlebih dahulu kita perlu memahami konsep demokrasi yang menjadi latar belakang dari dilaksanakannya pemilu tersebut. Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan konsep pemilu yang akan kita bahas.

Manusia dengan akalny mampu melakukan sesuatu yang di kehendaknya, untuk itu haruslah terdapat pembahasan dalam segala bentuk perbuatan yang dilakukan. Dalam teori terbentuknya negara<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Soehino, *Ilmu Negara*, (Jogjakarta : Liberty, 2005), 14.

Melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis, maka diharapkan pergantian pemerintah juga dapat dilaksanakan secara tertib dan damai. Selain itu dengan dilaksanakannya pemilihan umum ruang politik publik terbuka lebih luas lagi. Pemilihan umum merupakan satu sarana untuk menilai kualitas demokrasi pada suatu negara, selain adanya berbagai macam kebebasan (kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan dalam beragama) dan persamaan di depan hukum. **Sulastomo** mengemukakan bahwa dalam pemilihan umum, sebuah negara diyakini dapat membangun bangsa sesuai dengan aspirasi rakyatnya secara berkelanjutan, tertib dan aman. Dengan pemilihan umum dapat tercipta suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat melindungi hak-hak setiap warga negara.



sehingga mampu mendorong kreativitas setiap individu untuk ikut berperan dalam membangun bangsanya.<sup>3</sup>

Pemilihan umum dapat diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan (*representative government*). Pemilihan umum juga disebut dengan arena '*political market*' yang berarti bahwa pemilu menjadi tempat dan individu / masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontrak sosial dengan para peserta pemilu.

Pemilu merupakan suatu arena kompetisi. Menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara. Menentukan pemilihan dalam pemilu merupakan hak setiap warga negara. Dalam kehidupan berdemokrasi, pemilu adalah suatu proses yang substansial dalam penyegaran suatu pemerintah. Dikatakan penyegaran karena pemilu yang dilakukan secara berkala merupakan suatu sarana untuk meregenerasi kepemimpinan sehingga dapat mencegah munculnya kepemimpinan yang otoriter. Melalui pemilu rakyat menilai kinerja pejabat yang telah mereka pilih sebelumnya dan menghukumnya dengan cara tidak memilihnya pada pemilu berikutnya jika kinerja selama menjadi pejabat di nilai buruk. Dengan demikian, para pemimpin rakyat yang menjadi badan anggota legislatif maupun yang menduduki jabatan eksekutif diseleksi dan diawasi sendiri oleh rakyat.

<sup>3</sup>Sulastomo, *Demokrasi atau Democracy*, (Jakarta : RajaGafindo Persada. 2001), 5.



Secara umum, istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologis yang sama atau menjadi bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana. Istilah lain untuk “tindak pidana” adalah “perbuatan pidana” atau “delik” yang dalam bahasa belanda disebut dengan *strafbaar feit*. Jika dikaitkan dengan pemilu, maka dapat diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu

Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, ia akan menjadi lebih spesifik, yaitu hanya terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam arti, istilah tindak pidana pemilu diperuntukan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012, tindak pidana pemilu didefinisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap

Berdasarkan definisi tersebut, perbuatan/tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi bahwa tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Sesuai definisi itu, juga dapat dipahami bahwa tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran tersebut diancam sanksi pidana dalam UU pemilu.

Lebih jauh, kriminalisasi atas perbuatan tertentu sebagai tindak pidana pemilu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: pelanggaran dan kejahatan. Hanya saja, UU pemilu legislatif tidak mendefinisikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan tindak pidana dalam bentuk pelanggaran dan ada pula cakupan/definisi tindak pidana kejahatan. UU ini hanya mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan juga kejahatan yang satu sama lain sulit untuk membedakan secara pasti.

Para pelaku tindak pidana kekerasan dalam pemilu dapat dijerat hukum berupa dakwaan berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 198A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan



Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman masing-masing *jarīmah ta'zīr*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

---

mad Ward Muslich, Masyrofah, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar  
 ika, 2004), 19



2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kekerasan dalam penjatuhan keringanan hukuman dan denda?

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dari kajian yang telah ada.

## F. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana kekerasan dalam pemilu dalam putusan nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN.Mks tentang Kekerasan dalam Pemilu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Pemilu dalam putusan nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

## G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu:

- ## 1. Aspek Teoritis

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami dan untuk memudahkan dalam menelaah skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah dari judul skripsi ini, yaitu:







dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara diketik dan ditulis. Dokumen yang di teliti adalah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN.Mks tentang Dengan Sengaja Melakukan Tindak Kekerasan Atau Menghalang-halangi Penyelenggaraan pemilihan Dalam Melaksanakan Tugasnya.

- b. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel dan internet, teknik mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.

### 3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Editting*, yakni meneliti kembali data-data yang diperoleh untuk mengetahui informasi dari kelengkapan, catatan pengumpulan data, kejelasan makna, kesesuaian dan keberagaman suatu data.<sup>11</sup>
- Yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berdasarkan hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

<sup>11</sup>Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 125-126.

a. Deskriptif analisis, yaitu teknik analisa yang menggambarkan sebuah data sesuai faktanya, sesuai objek penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN.Mks tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pemilu yang secara keseluruhan dianalisis menggunakan hukum pidana islam.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas agar mudah dipahami oleh pembacanya mengenai pokok-pokoknya, penulis akan menyusun sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan manfaat peneltian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori *ta'zīr* tentang tindak pidana kekerasan dalam perspektif hukum pidana Islam. Meliputi Pengertian, dasar hukum, unsur-unsur, saksi hukumnya, dan kaitannya dengan asas legalitas dalam Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Bab ketiga memaparkan data berisi tentang pengujian data yaitu putusan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN.Mks tentang Tindak Pidana Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Menghalang-halangi Penyelenggaraan Pemilihan dalam Melaksanakan Tugasnya.

Bab keempat menganalisis deskripsi data dan masalah yang ada pada bab tiga menggunakan teori-teori yang terdapat pada bab dua berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam yang mengenai tindak pidana kekerasan dalam pemilu, yang kemudian akan disimpulkan pada bab lima.



*JARĪMAH TA'ZĪR*

## 1. Pengertian tindak pidana atau *Jarimah*

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدَاوُ تَغْزِيرٍ

Abdul Qadir ‘Audah menyatakan:

فَاَلْجَرِيْمَةُ اِذْنٌ هِيَ اَيْثَانُ فِعْلٍ مُّحَرَّمٍ مُّعَا قَبٍ عَلٰى فِعْلِهِ اَوْ تَرْكُ فِعْلٍ مُّحَرَّمٍ التَّرْكَ مُعَا قَبٌ عَلٰى تَرْكِهِ ، اَوْ هِيَ فِعْلٌ اَوْ تَرْكٌ نَصَّتْ الشَّرِيعَةُ عَلٰى تَحْرِيمِهِ وَالْعِقَابُ عَلَيْهِ

Pada dasarnya istilah *jīnāyah* mengacu kepada hasil perbuatan

seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha', perkataan *jināyah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara'*. Meskipun demikian, pada umumnya, fuqaha'

<sup>2</sup> Mustifa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), 15.

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata “*syara*” pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru di anggap *jarimah* apabila dilarang oleh *syara*’.

Pada *Jarīmah* itu sendiri memiliki unsur-unsur di dalamnya, *Jarīmah* itu memiliki unsur umum dan unsur khusus yang terdapat pada setiap jenis *Jarīmah*, sedangkan unsur khusus *Jarīmah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada jenis *Jarīmah* tertentu dan tidak terdapat pada jenis *Jarīmah* yang lain.

Semua tindakan atau perbuatan yang dianggap sebagai *Jarīmah* adalah apabila telah memenuhi unsur-unsurnya. Dalam *Jarīmah* ini unsur-unsurnya dibagi menjadi dua yaitu yang pertama adalah unsur umum dan yang kedua adalah unsur khusus. Unsur umum artinya sebuah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana yang berlaku pada semua *jarīmah*, tetapi untuk unsur khusus ini adalah unsur yang hanya berlaku untuk masing-masing *Jarīmah* dan berbeda antara *Jarīmah* yang satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup>

Unsur-unsur umum untuk *Jarīmah* yaitu antara lain:

Yang dimaksud dengan unsur formal adalah adanya *nash* atau ketentuan yang menunjukan sebagai tindakan *Jarīmah*. *Jarīmah* tidak akan pernah terjadi sebelum dinyatakan dalam *nash*. Dan khusus untuk *Jarīmah ta'zīr* harus ada peraturan dan Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa.

Yang dimaksud dengan unsur material adalah adanya suatu perilaku yang membentuk *Jarimah*, yaitu adanya sesuatu yang melawan



Yang dimaksud dengan unsur moral adalah adanya niat pelaku untuk melakukan *Jarīmah*. Unsur ini menyangkut tentang tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan pada orang yang telah baligh, sehat akal, dan ikhtiar (berkebebasan berbuat). Wahbah Azuaili yang mengutip dari Raddul Muhtar telah memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman *tak'zīr* yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran dan menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik itu dengan ucapan, perbuatan ataupun dengan isyarat, baik korbannya seorang mukmin ataupun orang kafir.<sup>5</sup>

Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata Fiqh *Jināyah*. Fiqh *jināyah* merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari sebuah pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Mustafa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, ... 84-85

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam, (Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, terj. dari al-Fiqh al- Islami wa Dilalatuhu)*, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 532

kejahatahn yang mengganggu ketentraman serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis.

Tindakan kriminal banyak jenisnya salah satunya adalah tindakan kriminal seperti penganiayaan, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebuah tindakan yang dapat melukai seseorang dengan tangan kosong atau dengan benda tumpul, tindakan penganiayaan juga dapat membuat orang lain cidera. Adapun dalam hukum islam yang dimaksud dengan *Jarīmah* penganiayaan, yaitu:

a. Pengertian *Jarimah* penganiayaan

Imam Hanafi mengatakan bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana selain jiwa, istilah ini sebagai dari tindak pidana terhadap nyawa (*aljinayataal-nafs*). Tindak pidana yang selain nyawa (penganiayaan) yakni berupa rasa sakit yang menimpa pada badan manusia yang datang dari manusia lain.<sup>7</sup>

Dalam istilah hukum islam bisa diartikan dengan kata *Jarīmah* dalam larangan syara' yang telah diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*. Arti kata *Jarīmah* adalah mempunyai kandungan makna yang sama dengan kata *jināyah*, didalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah pidana delik atau tindak pidana. Menurut sayyid Sahiq *jināyah* yaitu segala tindakan yang dilarang oleh syariat islam dan yang harus

<sup>7</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (At-Tasyri Al-Jina'i Al-Ilamiy Muqaranan Bil Qananul Wad'iy), (Alic Yavie DKK), Jilid III, (Bogor: PT Charisma ilmu, t.t), 204.

dihindari. Karena perbuatan ini dapat menyebabkan bahaya yang sangat nyata terhadap agama, akal, harga diri, dan juga benda.<sup>8</sup>

## 1. Penganiayaan ringan

Melukai bagian badan yang tidak sampai merusak anggota badan atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka *sajaaj* dan hijarah melainkan hanya menimbulkan luka ringan saja, misalnya goresan kecil, luka sayatnya kecil atau ringan. Dalam hal ini pelaku dikenakan *ta'zīr*, dan dalam hal ini hukuman pelaku diserahkan kepada ulil amri.

## 2. Penganiayaan berat

Perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya fungsi anggota badan itu sendiri, dilihat dari aspek sasarannya, penganiayaan berat ini menjadi beberapa jenis yaitu:<sup>9</sup>

## Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya

Maksudnya adalah dari jenis penganiayaan ini suatu tindakan perusakan terhadap anggota badan atau anggota-anggota lainnya, baik berupa pemotongan atau perlukaan. Di dalam pemotongan tangan, kaki, kuku, jari, hidung, biji pelir, zakar, bibir, pencongkelan mata, pemotongan rambut, alis, bulu mata, bibir, jenggot, kemaluan wanita dan lidah, dan juga merontokkan gigi.

<sup>8</sup> Sayyid sahiq, *Fikih Sunah*, Jilid X, (Bandung: Al Ma'rifat, t.t), 75

<sup>9</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993), 115

- a) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih utuh

Maksudnya adalah penganiyaan ini meupakan jnis tindakan yang merusak fungsi anggota badan, tetapi jenis anggota badan masih tetap utuh.

- b) Sajaaj

Maksudnya adalah penganiayaan ini termasuk perlukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Menurut Imam Abu Hanifah *sajaaj* adalah pelukaan pada bagian kepala tetapi di bagian khususnya misalnya bagian tulang, contohnya, dahi, sedangkan pipi yang lebih banyak dagingnya tidak termasuk. Namun ulama lain berpendapat bahwa perlukaan pada bagian muka secara mutlak termasuk *sajaaj*.<sup>10</sup>

- c) Jirahah

Maksudnya adalah penganiayaan ini merupakan jenis perlakuan pada anggota badan selain wajah dan kepala. Anggota yang termasuk dalam jirahah yaitu leher, dada, perut, sampai batas

b. Sanksi *Jarimah* Penganiayaan

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah . . .*, 102

## 1. Hukuman *Oishas*

## 2. Hukuman *Diat*

### 3. Hukuman *Ta'zir*

<sup>12</sup>Rahmat Hakim, “Hukum Pidana Islam “Fiqh Jinayah”, (Bandung: Pustaka setia, 2000) 10

Dalam *jarīmah* juga ada berbagai macam jenis dan macam *jarīmah* dengan aspek yang di tonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi *jarīmah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Quran atau al-Hadis. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

- Jarimah hudud*
- Jarimah Qishah/diyat, dan*
- Jarimah Ta'zir*

*Jarīmah hudud* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *hadd*. Pengertian hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dalam hubungannya dengan hukuman *hadd* pengertian hak Allah adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa di hapuskan oleh perseorangan yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang di wakili negara.







Abdul Aziz Amri membagi *jarīmah ta'zīr* dalam beberapa bagian yang sangat terperinci, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. *Ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.

Dalam hal *jarīmah* pembunuhan diancam dengan hukuman *qishas* mati, dan apabila hukuman mati dimaafkan oleh pihak keluarga korban maka hukuman *qishas* dapat diganti dengan hukuman *diat*. Jika hukuman *diat* di maafkan oleh keluarga korban maka ulil amri dapat menjatuhkan hukuman *ta'zīr*. Dalam hal ini dipandang lebih maslahat.

2. *Ta'zir* berkaitan dengan perlukaan

Dalam *jarimah* perlakuan hukuman *qishas* dapat disatukan dengan hukuman *ta'zir*. Karena *qishas* sendiri merupakan hak adami dan *ta'zir* adalah imbalan atas masyarakat. Dalam hal ini dapat dijatuhi *ta'zir* jika pelaku penganiayaan telah dimaafkan oleh pihak keluarga korban, atau bisa pula jika terdapat suatu halangan yang menyebabkan *qishas* tidak bisa dilaksanakan.

3. *Ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Didalam *Jarīmah* kali ini sangat erat kaitanya dengan macam *jarīmah*, yakni *jarīmah* zina, menuduh zina, dan penghinaan. Dalam kasus perzinaan yang bisa dikenakan hukuman *ta'zīr* adalah yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan dalam hukuman *hadd*. Karena tidak

<sup>17</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Teras, 2009), 188

Adapun juga tuduhan selain tuduhan zina yang dikelompokkan kepada penghinaan yang termasuk dalam *ta'zīr*. Contoh perkara yang menuduh mencuri, mencaci maki, dan lain sebagainya. Beserta panggilan-panggilan yang tidak layak misalnya wahai kafir, wahai munafik, wahai fasik, dan lain sebagainya. Berlaku pula untuk semua penghinaan yang dapat dikenakan hukuman *ta'zīr*.

Yang dimaksud disini adalah *jarīmah* pencurian dan *jarīmah* perampokan. Jika kedua *jarīmah* tersebut syarat-syaratnya sudah terpenuhi maka pelaku dapat dikenakan hukuman *hadd*. Tetapi apabila syarat-syarat pada *jarīmah* tersebut tidak terpenuhi maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *hadd*, melainkan dapat dikenakan *ta'zīr*. Yang dapat dikenakan hukuman *ta'zīr* dalam *jarīmah* ini yaitu seperti percobaan pencurian, pencurian yang tidak sampai batas nishab, mengghasab, dan perjudian. Perbuatan yang sama yang dapat dikenakan hukuman *ta'zīr* adalah apabila terdapat pencurian dalam bentuk syubhat, pencurian yang dilakukan oleh keluarga dekat.

Yang dimaksud *jarimah* dalam kategori ini adalah suatu yang merugikan masyarakat, yakni mencakup korupsi atau suap, melakukan perlawanan terhadap petugas pemerintah, mengganggu keamanan Negara, melakukan pemalsuan tanda tangan, dan juga seorang hakim yang berbuat sewenang-wenang dalam memutuskan suatu perkara.

a) *Ta'zir* berasal dari *jarimah-jarimah* seperti *hudud* atau *qishas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, ataupun ada syubhat misalnya pencuriannya tidak sampai mencapai nisab, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.

- b) *Ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash *syara'* tetapi hukumanya belum ditetapkan, misalnya seperti riba, suap, dan mengurangi takaran timbangan.
- c) *Ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*, jenis ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, misalnya seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

## 7. Tujuan dan Syarat-Syarat Sanksi *Ta'zir*

Di bawah ini dari diberlakukanya sanksi *ta'zīr*, yaitu sebagai berikut:

- a. Preventif (Pencegahan). Di tujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah*.
- b. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* di kemudian hari.
- c. Kuratif (islah). *Ta'zir* harus membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
- d. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.<sup>19</sup>

*Syara'* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarīmah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zīr* mempunyai batas tertentu.

<sup>19</sup>M Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 142

*Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan.

Syaratnya adalah sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zīr* agar tidak mengulangi perbuatannya.

## 8. Kaidah dan Dhawabit *Ta'zīr*

Dalam pelaksanaan hukuman *ta'zīr* harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaannya, tidak bisa *ta'zīr* diterapkan kepada seseorang secara langsung dan sama rata dengan yang lainnya. Akan tetapi ada kaidah-kaidah atau rambu-rambu dalam penetapan hukuman *ta'zīr* kepada seseorang. Maka hukuman *ta'zīr* itu sendiri memiliki beberapa kaidah yang dipakai dalam penerapannya itu sendiri. Diantaranya yang dinitisarikan dari Qawaid wa Dhawabit al Uqubat al Huduh wa at *Ta'zīr* milik Ibrahim Fahd bin Ibrahim al Wad'an:

- a. Hukuman *ta'zīr* sesuai dengan kadar perbuatan dosa yang dilakukan  
yaitu bahwa sebuah hukuman harus sesuai dengan perbuatan dosa yang dikerjakan. Dengan syarat perbuatan kejahatan itu mewajibkan dilaksanakannya hukuman. Maksud dari hukuman tersebut terlaksana yaitu memberi efek jera bagi pelaku maksiat serta tindakan preventif untuk kemaslahatan masyarakat.
- b. Hukuman sesuai dengan kondisi pelaku kejahatan

bahwa dalam memutuskan hukuman kepada pelaku kejahatan maka harus memperhatikan tahapan-tahapan dalam penegakan hukuman *ta'zīr* yang akan di jatuhkan kepada pelaku kejahatan. Beliau mengatakan, “Bahwa Mawardi berkata:’Tingkatan manusia berada pada derajatnya, maka dalam masalah ketentuan huduh manusia semua sama tidak ada yang membedakan, akan tetapi dalam masalah ta’zir maka harus dilihat dari kemampuan dalam menerima hukuman *ta'zīr*’

Seorang pemimpin adalah wali bagi rakyatnya berkaitan dengan masalah umum dan ketatanegaraan. Maka segala kebijakan seorang pemimpin harus melihat keselarsanya dengan kemaslahatan hukum.

Ada banyak hukuman dalam *ta'zīr*, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai adapun hukuman yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara pun ada yang masuk dalam *jarīmah ta'zīr*, hakim diberi



pembuat fitnah *residivis* yang berbahaya. Tetapi sebagian fuqaha, dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ada hukuman mati.<sup>22</sup>

b. hukuman cambuk

Hukuman cambuk dianggap cukup efektif dalam menjerakan para pelaku tindak *jarīmah ta'zīr*. Dalam hukuman ini *jarīmah hudud* sudah jelas jumlah hukumannya bagi para pelaku *jarīmah* zina ghairu muhsan dan *jarīmah qadzaf*. Akan tetapi di dalam *jarīmah ta'zīr*, hakim telah diberikan wewenang untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.

c. Hukuman Jilid

Hukuman ini merupakan hukuman pokok yang didalam syariat islam untuk *jarīmah hudud*, tetapai hanya ada beberapa *jarīmah* saja yang dikenakan hukuman jilid. Misalnya seperti zina, qadzaf, dan minuman khamr. Hukuman *ta'zīr* dapat diterapkan dalam berbagai macam jenis *jarīmah*, untuk *jarīmah* yang berbahaya pun bisa diterapkan. Hukuman Jilid lebih diutamakan, karena:

1. hukuman jilid lebih sering berhasil dalam memberantas para penjahat yang sudah biasa melakukan tindak pidana.
2. Ada dua batas dalam hukuman jilid yaitu, batas tertinggi dan batas terendah. Hakim bisa memilih jumlah jilid yang ada pada kedua hukuman tersebut dengan menyesuaikan keadaan si pelaku *jarimah*.

<sup>22</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, . . . ,299



- d. Hukuman kawalan

Ada dua macam hukuman kawalan pada syariat islam, yang pertama hukuman kawalan terbatas dan hukuman yang tidak terbatas. Dalam pengertian tersebut adalah dalam konteks yg dilihat dari segi waktu. Dalam hukuman berbatas waktu ini adalah paling sedikit satu hari, dan yang paling lama atau tertinggi adalah tidak adanya kesepakatan di kalangan fuqaha. Para ulama Syafi'iyah telah menetapkan batas tertingginya hukuman adalah selama satu tahun.

Dalam hukuman kawalan tidak terbatas ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, tetapi dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau telah melakukan taubat dan pribadinmya menjadi lebih baik. Dan orang-orang yang dikenai hukuman ini adalah para penjahat yang berbahaya, ataupun orang-orang yang mealukan secara berulang-ulang jarimah yang berbahaya.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Ibid, 160





- a. Hukuman diterapkan meskipun dari berbuat maksiat. Atau menurut Ibn Hammam dalam Fathun Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).<sup>28</sup>
- b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki beratnya hukuman

<sup>28</sup> Ibid., 11-12



**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
NOMOR.1238/Pid.sus/2018/PN.Mks TENTANG KEKERASAN DALAM  
PENYELENGARAAN PEMILU**

Pengadilan Negeri Makassar berada di jalan R.A Kartini Npomor 18/23, Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang, Kotab Malassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelah barat berbatasan dengan gedung kejaksaan Negeri Makassar. Menurut catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada tahun 1915 dengan nama Raad van Justitia.

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan digunakan untuk mewujudkan tercapainya tugas utama dsan fungsi Pengadilan Negeri Makassar kelasn 1a. Visi pengadilan negeri Makassar kelas 1a adalah “Terwujudnya Pengdilan Negeri Makassar kelas 1a Khusus yang Agung”<sup>1</sup>

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan negeri Makassar Kelas IA Khusus
4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi di Pengadilan negeri Makassar Kelas IA Khusus.

## 1. Kronologis Kasus

Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa Drs.Sabri, laki-laki yang berkebangsaan Indonesia dan lahir di Makassar pada tanggal 31 Desember 1967. Terdakwa bertempat tinggal di Jln. Karunung raya V No.4

kel.karunung kec. Rappocini Kota Makassar, beragama islam dan pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai PNS (Sekretaris KPU Kota Makassar).<sup>2</sup>

Dalam perkara ini terdakwa di tuntut oleh penuntut umum pada tanggal 6 Juli 2018 untuk dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan yang sudah diatur dalam Pasal 198A nomor 10 Jo UU No 1 Thn 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan beberapa barang bukti yaitu:<sup>3</sup>

- a. 1 (satu) Visum Et Repertum Nomor Ver / 31 / VII / 2018 Forensik, tanggal 6 juli 2018-09-30
- b. 1 (satu) kartu Id Card atas nama RUSLI

Pada tahun 2018 berlangsung pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Makassar. Kemudian KPU Kota Makassar melaksanakan perhitungan dan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan pemilihan Walikota/Wakil Walikota Makassar tahun 2018 di Hotel Maxone Jln. Taman makam Pahlawan Makassar.

<sup>2</sup> *Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN.Mks*., 1



Pada hari jumat pada Tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wita, Pelapor berada dibelakang Operator yang sedang melakukan rekapitulasi perhitungan suara. Pada saat pelapor melaksanakan tugas pengawasan rekapitulasi perhitungan suara tiba-tiba terkadwa Drs. Sabri melakukan pemukulan terhadap pelapor, akibat pemukulan tersebut pelapor tertunda dan tidak dapat melanjutkan tugasnya sebagai pengawas rekapitulasi penghitungan suara.

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam pasal 198A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Undangundang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Untuk membuktikan dakwaanya jaksa penuntut umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pokoknya dan melalui sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut:

Saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saksi adalah PANWASCAM di Kecamatan Sangkaran Kota

Saksi bertugas di Hotel Maxone sejak hari Rabu Tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 6 Juli 2018, sesuai perintah dari Ketua Panwas Kota Makassar yaitu Nursani, SH, MH. Saksi ditugaskan mengawasi bagian operator bersama Panwascam Mamajang. Posisi saksi saat itu berdiri di belakang kurang lebih 1 meter dari operator, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi dan melakukan penganiayaan kurang lebih 5 menit dengan menggunakan tangan terbuka atau menempeleng sebanyak 2 kali, dan mengenai kepala bagian belakang saksi. Sebelum peristiwa penganiayaan terjadi saksi dan terdakwa tidak pernah ada permasalahan. Setelah terjadi penganiayaan baru terdakwa melontarkan kata-kata yaitu “kenapa ada pengawas disini”.

Akibat penganiyaan tersebut saksi mengalami pusing dan bengkak di kepala bagian belakang. Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan karena tidak memukul saksi hanya memegang badan dan menariknya menjauh dari meja operator.

2. Saksi Sirajuddin, S.E.I., M.E

Saksi berada di salah satu ruang di lantai 3 Hotel Maxone sejak pukul 09.00 sampai sekitar pukul 17.00 Wita setelah itu saksi baru meninggalkan hotel Maxone. Saksi berada di Hotel tersebut karena mendapat undangan untuk melakukan pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 selaku Panwas Kecamatan Panakkukang. Bersama semua anggota Panwas kecamatan sekota Makassar yang berjumlah sekitar 40 orang termasuk staff operator dan perwakilan dari Bawaslu RI.<sup>5</sup>

Saksi melihat langsung kejadian penganiyaan terhadap Rusli yang dilakukan terdakwa Sabri, yang berada di salah runagan di lantai 3 Hotel Maxone tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi perhitungan suara.

Saat terjadinya penganiyaan tersebut saksi berada sekitar 3 meter dari tempat kejadian dan melihat terdakwa memukul kepala bagian belakang Rusli sebanyak 2 kali dengan tangan kanan yang terbuka atau menempeleng. Dan saksi tidak tau sebab kenapa terdakwa melakukan penganiyaan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan karena tidak merasa meukul atau menempeleng saksi Rusli.

<sup>5</sup> Ibid., 6

### 3. Saksi Alias, S.Pi

Pada hari jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wita di hotel Maxone di Jalan Tmana Makam Pahlawan Kota Makassar tepatnya didalam salah satu ruangan dilantai 3 hotel tersebut. Saksi duduk di belakang operator KPU Kota Makassar yang berjumlah 5 orang yang bertugas menginput data yang dibacakan oleh PPK masing-masing Kecamatan, setau saksi Rusli berada disebelah kiri saksi.

Saat kejadian penganiyaan korban tepat berada dibelakang saksi dalam posisi berdiri sambil mengawasi operator yang sedang menginput data, dan korban diperintah oleh Ketua Panwas Kota Makassar yaitu Nursari, S.H., M.H.<sup>6</sup>

Saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan penganiyaan, tetapi hanya mendengar suara orang di pukul dan saksi membalikan badan dan berdiri. Dan terdakwa sudah memegang badan Rusli sambil menariknya. Saksi tidak tau sebab terdakwa melakukan terdakwa melakukan penganiyaan dan akibat yang dialami korban, karena korban langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Dengan adanya kejadian tersebut proses rekapitulasi perhitungan suara terganggu. Terhadap keterangan saksi, terkdakwa membenarkanya.

4. Saksi Yuswita Alias Wita (Staf sub teknis dan humas)

<sup>6</sup> Ibid., 7

Saat kejadian saksi duduk dikursi operator dan fokus Saat PPK Kecamatan Manggala akan membacakan perhitungan suara di tingkat Kecamatan Manggala Kota Makassar.

Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi saksi mendengar suara seorang laki-laki dengan nada keras yang terkesan menegur. Menurut saksi suara tersebut adalah suara Sekretaris KPU Kota Makassar dengan mengucapkan “apa kau bikin disini?” disertai dengan satu kali bunyi suara tepukan yang tidak terdengar jelas dikarenakan saksi fokus di depan computer. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.<sup>7</sup>

Jabatan saksi sebagai karyawan honorer di KPU Kota Makassar, yang bertugas di divisi teknis sebagai staf kegiatan teknis yang diperintahkan oleh kasubag KPU dan Sekretaris KPU Kota Makassar. Tugas Divisi Teknis sosialisasi untuk mensukseskan pilkada yang bertujuan untuk meningkatkan

partisipasi pemilih, pembuatan spanduk, atribut-atribut sosialisasi, rekapitulasi perhitungan suara,

KPU Kota Makassar memaang benar melaksanakan rekapitulasi perhitungan suara pada pilkada serentak tahun 2018, yang dilaksanakan di Hotel Maxone lantai 3 di Jalan Taman Makam Pahlawan No.5 Kel.Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar sejak hari Kamis tanggal 5 Juli sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Juli 2018.

Saksi bertugas sebagai operator SITUNG bersama dengan Yuswita. Pada saat itu saksi tidak melihat korban di Hotel Maxone, tetapi setelah korban ditegur oleh Terdakwa saksi sadar bahwa korban sedang duduk disebelah kiri saksi yang seharusnya tempat duduk tersebut ditujukan untuk tempat duduk Yuswita.

Pada saat itu saksi mendengar terdakwa menegur dan bertanya kepada korban dengan mengatakan “kami siapa” dan dijawab oleh korban saya operator, dan diulang oleh terdakwa dan dijawab oleh korban “saya operator panwascam”, sepiantas saksi melihat korban lari menuju pintu keluar dan suasana menjadi gaduh sehingga proses rekapitulasi dihentikan atau diskors.<sup>8</sup>

Saksi tidak melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dan tidak memperhatikan korban menggunakan Id Card yang

<sup>8</sup> Ibid., 9

digantungkan di lehernya. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Andi Muh. Arham Pattiroi (Karyawan Honorer)

Jabatan saksi sebagai karyawan honorer KPU di Kota Makassar dengan jabatan staf subbag divisi teknis, sebagai pembantu pimpinan khususnya di divisi teknis.

Pada tanggal 6 Juli 2018 saksi berada di Hotel Maxone Kota Makassar yang sedang diselenggarakan kegiatan rekapitulasi hasil suara Pilgub dan Pilwali. Dan saksi bertugas untuk melengkapi sarana dan prasarana kegiatan tersebut.

Saksi tidak pernah melihat korban namun setelah ada keributan di meja operator saksi baru melihat korban. Terdakwa meneriaki korban dan mengatakan “apa ko bikin disini?”, setelah diteriaki korban lari dan menghampiri saksi dan saat itu juga saksi memegang tangan korban dan membawa ke pihak keamanan.

Terdakwa meneriaki korban dikarenakan korban duduk di meja operator, benar adanya terdakwa merupakan anggota panitia. Dan yang ,menjadi operator saat itu adalah Ardiansyah dan yuswita. Saksi tidak tahu kapasitas korabn pada kegiatan tersebut. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkanya.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan barang bukti yang sudah dihadirkan dalam persid

akan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum  
dan fakta-fakta hukum.

bahwa setiap kata “setiap orang” adalah identik dengan  
yaitu setiap orang atau siapa saja atau siapa pun

yang bertanggung jawab atas perbuatan atau yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perbuatan dan tindakanya.<sup>9</sup>

unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam pasal  
g Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua  
g Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan perat  
anti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Ter  
nur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang  
(subjek hukum) yang dapat memepertanggung jaw  
ndaknya di hadapan hukum. Dalam perkara ini yang  
wa adalah seseorang yang bernama DRS.SABRI dim  
matan Majelis Hakim selama persidangan terdakwa da

---



2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiyaan pada saat proses berjalanya perhitungan suara pilwakot”

Menurut fakta-fakta hukum terdakwa Drs Sabri telah dengan menggunakan tanganya untuk menepuk atau memukul saksi Rusli dibagian bahu sebanyak 2 kali disaat waktu itu saksi Rusli sedang berada dekat operator perhitungan suara pilwakot.

Padahal tempat dekat operator merupakan daerah steril dan tidak setiap orang bisa berada di tempat tersebut, sehingga ketika Terdakwa melihat keberadaan saksi Rusli, Terdakwa Drs Sabri berusaha mengingatkan atau menyuruh saksi pergi dengan cara menepuk atau memukul bahu saksi Rusli sebanyak 2 kali. Setelah kejadian pemukulan saksi Rusli kemudian berlari dan di teriaki oleh Terdakwa sehingga saksi Rusli diamankan oleh keamanan. Dan berakibat terhentinya rekapitulasi perhitungan suara. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim unsur “**Yang Dengan Sengaja**” ini telah terpenuhi.



Karena terdakwa terbukti bersalah maka terdakwa harus dijatuhi Pidana.

D. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Penyelenggaraan Pemilu dalam Putusan Nomor.1238/Pid.Sus/2018/PN.Mks

Sebelum dijatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang mengenai memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, yakni sebagai berikut:

### 1. Hal-Hal yang Memberatkan

Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dengan melakukan tindak kekerasan pada orang lain, mengingat terdakwa juga adalah seorang Pegawai Negeri Sipil/PNS (Sekretaris KPU) .<sup>11</sup>

## 2. Hal-Hal yang Meringankan

<sup>11</sup> Ibid., 17

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan sudah mengetahui atau memeriksa alat bukti di persidangan, maka majelis hakim yang dipimpin oleh Tito Suhud, S.H., M.H sebagai hakim ketua majelis, Muhammad Salam Giri Basuki, S.H., Doddy Hendrasakti, S.H. masing-masing sebagai hakim Anggota, dengan memperhatikan pasal 198 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pasal 14 huruf a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1238/Pid.sus/2018/PN.Mks adalah sebagai berikut:



## BAB IV

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PUTUSAN NOMOR 1238/Pid.Sus/2018/PN.Mks TENTANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM PENYELENGARAAN PEMILU**

**A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam pernatuhan Keringanan hukuman dan denda**

Didalam memutuskan perkara hal yang paling utama dan yang paling penting adalah menyimpulkan atas adanya fakta yang terungkap dalam persidangan, Oleh karena itu hakim benar-benar memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dan berdasarkan rasa keadilan yang ada pada masyarakat. Di Indonesia ada 2 (dua) praktik pengadilan yang dikenal, yang pertama yaitu tindak pidana umum dan yang kedua yaitu tindak pidana khusus. Tindak pidana umum telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Islam atau biasa disebut dengan (KUHP), dan tindak pidana khusus diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang sudah pasti sifatnya khusus, contohnya Undang-undang tindak pidana korupsi, dan Undang-undang khusus lainnya.

Selaku penegak hukum pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mengenai tentang pemilu berupa Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan sanksi minimum dan maksimum terhadap orang dan perseorangan atau korporasi yang telah melakukan

Dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar  
1238/Pid.Sus/2018/PN.Mks tentang kekerasan dalam penyelenggaraan pemilu  
yang dilakukan oleh Terdakwa Drs Sabri ada pertimbangan hakim, adalah:

Bahwa setiap kata “setiap orang” adalah identik dengan kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau siapa saja atau tidak subjek hukum yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya atau yang dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam perbuatan dan tindakannya.

Unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam pasal 198A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang adalah seorang pelaku (subjek hukum) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tindakannya dihadapan hukum. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seseorang bernama Drs Sabri dimana berdasarkan pengamatan Najelis Hakim selama persidangan Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban yang logis dan dapat dpertanggungjawabkan menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

b. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan pada saat proses berjalanya perhitungan suara pilwakot”



c. Unsur “Melakukan Tindak Kekerasan atau Menghalang-halangi Pemilihan Dalam Melaksanakan Tugasnya”

Majelis tidak sependapat dikarenakan suara orang di pukul yang di dengar oleh saksi-saksi Alis, Yuswita, Ardiansyah, dan Andi Muh Arkam dapat dijadikan petunjuk untuk majelis hakim sebagai telah terjadinya atau adanya peristiwa penganiayaan tersebut. hasil visum et repertum no Ver/31/VII/2018 forensik pada tanggal 6 juli 2018, dalam dakwaan yang menerangkan tidak terjadinya perlukaan, tidak ada kolerasinya dengan tindak kekerasan menurut majelis hakim karena dalam rumusan pasal yang ada di dakwakan oleh penuntut umum tidak ada rumusan yang berhubungan dengan perlukaan.

d. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dengan melakukan tidak kekerasan pada orang lain, mengingat terdakwa juga adalah seorang Pegawai Negeri Sipil/PNS (Sekretaris KPU).

Hal-hal yang Meringkan:

Salama saat proses persidangan Terdakwa bersikap sopan, dan saat pesidangan terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya.

Dari beberapa uraian di atas tersebut, penulis memiliki beberapa pendapat, yaitu:

1. Berdasarkan tuntutan pidana yang telah dijatuhkan oleh penuntut umum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana tersebut, penuntut umum dan hakim menjatuhkan pidana pokok sangat ringan. Sesuai dengan unsur-unsur diatas perbuatan terdakwa jelas bertentangan dengan apa yang sudah menjadi ketentuan hukum yang sudah berlaku. Dan mengingat yang ada dalam pasal 198A Undang-undang nomor 10 tahun 2016 hukuman yang sudah ditentukan, yaitu pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua

belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.00,00 (dua puluh empat juta rupiah). Tetapi dalam kasus ini penuntut umum memutuskan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) bulan penjara dengan denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Di dalam penjatuhan denda, hakim menentukan penjatuhan dibawah ketentuan minimum. Pada amar putusan ditetapkan pidana denda sebesar Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan pada ketentuan yang sudah ada dalam pasal 198A Undang-undang nomor 10 tahun 2016 ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam persoalan ini seharusnya hakim memperhatikan asas-asas yang ada atau yang terdapat dalam hukum pidana untuk menentukan sanksi pidana, terutama pada asas legalitas yang terdapat pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Yang dimaksud disini adalah ketika dalam memutuskan suatu perkara hakim harus menggunakan ketentuan yang berdasarkan pada

Undang-undang yang berlaku. Pada saat tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan pada Undang-undang, maka hakim telah melanggar ketentuan.

Selanjutnya membahas tentang masalah pidana denda, keefektifan pidana denda sendiri sudah lama ada di Indonesia, bahkan pidana denda adalah yang termasuk dalam pidana paling tertua. Pidana denda terdapat pada pasal 10 Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP). Pidana denda juga bisa dilihat atau dipandang sebagai jalan kedua pidana pencabutan kemerdekaan. Karena tujuan pemidanaan bukan berupa pembalasan, maka pada penjatuhan denda hakim harus benar-benar memperhatikan kemampuan di terpidana secara nyata.

Dari analisa yang sudah dijelaskan tersebut diatas menurut unsur-unsur perbuatan pidananya, maka sudah sangat jelas terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan saat penyelenggaraan pemilu. Tetapi dalam penerapan hukuman dedanya masih kurang efektif dan kurang tepat sesuai dengan apa yang sudah diperbuat oleh terdakwa. Akibat dari apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa maka ketentuan yang ada pada pasal 198A Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 layak diterapkan pada terdakwa.

**B. Analisa Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan keringanan hukuman dan denda**

Hukum pidana islam merupakan syariat islam yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia ataupun di akhirat.

## 1. Asas Legalitas

## 2. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain

### 3. Asas praduga tak besalah

Asas praduga tak bersalah yaitu ass yang mebdasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sbelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan dengan tegas kesalahanya itu.

Penerapan hukum pidana islam dalam rangka menyelamatkan manusia baik individual maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan.<sup>2</sup> Hukuman yang diartikan dengan pidana suksaan atau ganti rugi merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang dan melanggar aturan.<sup>3</sup> Hukuman harus mempunyai dasar baik dalam Al-Quran, hadis atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman.<sup>4</sup>

Pada hukum pidana islam, dalam pertanggungjawaban didasari pada tiga hal. Pertama adanya perbuatan yang dilarang, kedua adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat, ketiga kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.<sup>5</sup> Itu artinya orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban.

<sup>3</sup> Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014), 116

<sup>4</sup> *ibid.*, 124

<sup>5</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 200), 175

Berdasarkan fakta yang ada didalam persidangan jika disambungkan dengan hukum pidana islam, maka perbuatan terdakwa termasuk suatu jarimah dan harus dijatuhi sebuah hukuman sesuai dengan unsur yang telah dilakukan. Di dalam perkara ini terdakwa yang bernama Drs Sabri telah terbukti secara sah melakukan tindak penganiyaan yang dilakukannya kepada seorang panwascam yang bernama Rusli, dengan memukul sebanyak dua kali di daerah dibelakang kepala menggunakan tangan kosong.

Berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan, terdakwa sudah mengaku menyesal dan sudah mengakui perbuatannya. Maka perbuatan yang telah dilakukan tersebut dapat diertanggungjawabkan karena unsur-unsur pada hukum pidana islam telah terpenuhi, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan (*al-rukn al-madi*) yang mana ada suatu perbuatan yang merupakan suatu *jarīmah*. Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan bukti yang sudah ada, bahwa Rusli telah menjadi korban kekerasan fisik, pemukulan di bagian belakang kepala sebanyak dua kali.





Menurut penulis hukuman yang harus ditetapkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan pidana islam, yaitu berupa *ta'zīr* yang pada masalah ini adalah berkaitan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.

Di dalam hukum pidana islam sendiri, majelis hakim diperbolehkan mempertimbangkan segala bentuk hukuman yang akan tentukan atau dijatuhkan. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan seperti ini diberikan atas dasar cara apa yang digunakan oleh Pengadilan atau bentuk tindak pidana yang dapat ditunjukan dalam Undang-undang.<sup>7</sup> Sanksi *ta'zir* juga diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah diperbuat. Ada perbuatan kejahatan yang besar akan dikenakan sanksi yang berat, agar tercapai tujuan sanksi yakni pencegahan.<sup>8</sup>

Dalam perkara ini hukuman *ta'zīr* yang pantas diterima oleh Drs Sabri adalah hukuman *ta'zīr* berupa penjara. Hukuma ini termasuk sebagai kekuasaan Majelis hakim, yang oleh sebab itu menurut kemaslahatan masyarakat.

<sup>8</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *“Terjemahan Fathul Mu’in”*, (Moch Anwar, et al.), (Bandung:Sinar BaruAlgesindo, 1994), 1603



# PENUTUP

Dari beberapa penjelasan penelitian di atas, penulis mengambil kesimpulan antara lain:

- 71



## DAFTAR PUSTAKA

- Muslich Ahmad Wardi dan Masyrofah. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Muslich Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Mustafa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, . . . 84-85.
- Pasal 260 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- RM Soeharto. *Hukum Pidana Materill*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993.
- Sahiq Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid X*. Bandung: Al-ma'arif. 1990.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Jogjakarta: Liberty. 2005
- Soekamto Sarjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2017.
- Suggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sulastomo. *Demokrasi atau Democrazy*. Jakarta: RajaGafindo Persada. 2001.
- Susanti Dyah Ochtorina dan Efendi A'an. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Syamsuddin Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*. 2005. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka.
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN.Mks.
- Mahkamah Agung republik Indonesia, "Pengadilan Negeri Makassar", <http://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/tentang-kami/visi-misi>, diakses pada 9 Juli 2019.